

Received: May 13, 2024
Accepted: June 13, 2024
Published: June 30, 2024

**PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI BRUNEI:
MENGAPA BEKERJA DI BRUNEI?**

2021-2023

Musa Maliki

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jakarta

Email: musamaliki@upnvj.ac.id

Witanti Prihatiningsih

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jakarta

Email: witanti.p@upnvj.ac.id

Reva Nurul Hikmah

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: reva.nurul@upnvj.ac.id

International migration is never ending issue in the era of globalization. International migration is significance discussed because it creates problems in the world. The focus of this research is to examine case study of Brunei as the destination of Indonesian migrant workers to acquire well-living and other purposes. By using phenomenological approach, this research argues that Indonesian migrant workers who seek for job opportunity in Brunei is not solely motivated by economic wellbeing, but others reasons such as escaping problems, gaining life experience, and creating distinguished image of working overseas. By applying qualitative method as such deep interview and phenomenological experience living in Brunei Darussalam for 2.5 years, as the result, this research found that the reasons Indonesian migrant workers go to Brunei Darussalam is very much complex, therefore cannot be reduced in the variable independent of economic purpose. It can be concluded that this research believes that the proses of international migration is more complex then seeking economic wellbeing. In short, Indonesian migrant workers cannot be conceptualized as the movement of international labors for achieving economic goals because Indonesian migrant workers are being a human as a whole and complex, not an atomistic entity as part of mode of production.

Keywords: Globalization, International Migration, Indonesia Migrant Workers, Phenomenology

Pendahuluan

Di era globalisasi, negara menjadi unit yang penting tetapi mengalami dinamika karena adanya dunia virtual yang sulit dikontrol negara, perusahaan transnasional yang berperan besar bisa mengalahkan negara, dan teknologi yang belum cukup dikuasai sepenuhnya oleh negara. Khanna (2016) mengungkapkan di majalah ekonomi Amerika yang cukup kritis, *Fast Company* bahwa negara telah mengalami krisis atas peran besar korporasi internasional atau biasa disebut korporasi multi-nasional (MNC). Negara dikendalikan oleh MNC. Negara juga tidak dapat mengendalikan teknologi yang mengaburkan batas wilayah, khususnya dengan adanya media virtual seperti Facebook, Tiktok, Instagram, dan sejenisnya.

Globalisasi ekonomi merupakan perwujudan dan implementasi dari ideologi neoliberal. Ideologi ini memberi kondisi negara mengabdikan pada peran dan kepentingan pasar dan MNC, bukan lagi kepada dirinya yang melayani masyarakat di dalamnya. Ideologi ini berlaku sejak awal 1980an di bawah kebijakan ekonomi, Ronald Reagan (Amerika) and Margaret Thatcher (Inggris) khususnya di kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan tersebut tentunya mempunyai beberapa kelemahan yang mengakibatkan krisis di tahun 2008 (Best, 2020). Oleh sebab itu, negara tetap harus berperan penting dalam mengendalikan pasar dan MNC.

Dalam Kajian Hubungan Internasional, di aspek Ekonomi Politik Internasional, Robert Gilpin adalah salah satu pionir pendukung negara dalam mengatur perekonomian dalam rangka menghadapi dominasi peran pasar dan MNC di tahun 1980an. Sebaliknya pandangan William I. Robinson berlaku sebaliknya, pasar dan MNC mempunyai peran lebih kuat dari negara. Bagi Gilpin, MNC dan pasar di dunia adalah representasi dari hegemoni Amerika

serikat. Sebaliknya, argumentandingannya menyebutkan kekuasaan MNC dalam pasar internasional semakin besar lebih besar daripada peran negara. Keuntungan perusahaan dalam ekonomi lebih besar daripada GDP suatu negara. Oleh sebab itu MNC mempunyai peran lebih kuat dibandingkan negara dalam tata dunia kapitalisme global (Babic, Fichtner & Heemskerk, 2017).

Kini, negara kapitalis baru menjadi istilah yang populer sebab kebangkitan Cina memberikan wadah baru dengan sebutan negara otoritarian kapitalis yang berhadapan dengan negara liberal kapitalis dengan diwakili oleh Amerika. Fenomena negara kapitalis Cina yang ekspansi ke Afrika, Amerika Latin dan Asia adalah bukti bahwa ekspansi ekonomi juga bentuk dari ekspansi geopolitik dengan menghasilkan hubungan baru, yakni *South-South Relations* (Alami, Dixon, Gonzalez-Vicente, Babic, Seung-Ook Lee, Medby, & Graaff, 2022).

Peran negara sangat penting dalam menyikapi kapitalisme global yang melahirkan hubungan baru yakni Selatan-Selatan. Hubungan ini memberikan legitimasi tentang bagaimana buruh juga mengalami transnasionalisme di antara negara-negara selatan.

Migrasi internasional adalah fenomena Hubungan Internasional yang sudah sangat tua. Kebijakan migrasi di Indonesia sudah ada sejak penajahan Belanda dalam kerangka kebijakan politik etis van Deventer di abad ke-19. Pasca kolonialisme dan kebangkitan ideologi neoliberal, migrasi internasional digencarkan kembali di masa rezim Suharto di saat negara-negara Timur Tengah membutuhkan buruh (pekerja) murah. Pada waktu itu negara Timur Tengah dipaksa mencari buruh murah karena adanya krisis minyak. Utamanya, pencarian buruh murah adalah kebijakan paket-paket neo-liberal yang didorong Amerika dan Inggris (*Reaganism* dan *Thatcherism*) (Šumonja, 2021).

Dalam perkembangannya migrasi internasional sejak tahun 1945 sampai 2020 terus meningkat. Jika dilihat data dari IOM dari jumlah yang tidak signifikan di tahun 1945 sampai 2020 mencapai hampir mendekati 2000 juta migran internasional (terlihat di warna garis hijau. Migrasi internasional ini meliputi buruh, pengungsi, dan pencari suaka.

WORLD MIGRATION REPORT 2022



Migrasi buruh/pekerja sangat penting untuk suatu kawasan. Migrasi ini digerakkan oleh faktor kemiskinan di desa dan perbedaan gaji yang besar antara kawasan dan sub kawasan. Selain itu ada daya tarik kuat bagi negara yang didatangi karena adanya jaringan yang kuat, industri migrasi yang stabil, agen migransi yang kompetitif. Di negara Asia Tenggara, negara dominan yang didatangi kaum imigran rendah/kasar (*domestic worker*) dari desa-desa yang sulit mencari pekerjaan diantaranya Thailand, Singapura, dan Malaysia; negara asal kaum imigran utamanya Indonesia, Filipina Myanmar dan Vietnam. Sebagai tambahan, di Asia Tenggara, pekerja migran ilegal (*irregular migration*) seringkali atau populer berasal dari sub Kawasan Sungai Mekong ke Thailand dan Indonesia ke Malaysia (Migration data Portal, 31 Mei, 2023). Sungai Mekong dimaksud kebanyakan dari kamu migran negara asal Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam ke Thailand. Hal ini memberi konsekuensi buruh seperti perdagangan manusia di Thailand (DW, 28 Desember, 2009; Sari, Maunati, dan Wiratri, 2018; Tirtosudarmo, 2016). Rother (2018: 183-184) menyebutkan bahwa negara-negara yang dominan menjadi

buruh migran berasal dari Indonesia, Filipina, Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam sedangkan yang didatangi secara signifikan adalah Brunei dan Singapura. Thailand dan Malaysia adalah negara yang secara seimbang menjadi pengirim pekerja migran ke luar negeri sekaligus juga didatangi para imigran dari luar negeri. Jadi mobilitas para pekerja/buruh migran di Asia Tenggara (ASEAN) sangat intens dan memang isu sensitif karena menentukan pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara dan memberi konsekuensi sosial dan politik kawasan. Selain itu, dari negara pengirim dan yang dikirim dapat dipahami bahwa diantara negara ASEAN terjadi ketimpangan perekonomian. Contoh sederhana saja, banyak pekerja migran Indonesia ke Malaysia baik secara terdokumentasi maupun tidak terdokumentasi demi mendapatkan gaji yang mereka anggap besar jika di Indonesia, tetapi bagi masyarakat Malaysia sendiri sedikit (rendah) dan pekerjaannya rendah. Contoh ini menjelaskan ketimpangan system penggajian di negara ASEAN, khususnya Indonesia dan Malaysia.

Dalam konteks ini, migrasi kawasan menjadi isu kontemporer Hubungan Internasional yang tidak dapat dipungkiri lagi, khususnya kerja sama Selatan-Selatan. Isu Hubungan Internasional ini dijelaskan melalui masukan teoritis ekonomi, sosial, dan antropologi. Hal ini memperkaya kajian Hubungan Internasional.

Migrasi internasional yang akan dibahas dalam artikel ini adalah para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Brunei Darussalam. Brunei bukan negara pengirim kaum pekerja migran. Brunei adalah negara kecil secara wilayah dan jumlah penduduk, tetapi menjadi faktor daya tarik PMI karena faktor jaringan orang-orang Indonesia yang sudah banyak di sana, Bahasa Melayu yang mudah dipahami orang Indonesia, mata uang yang tinggi sama dengan mata uang Singapura, dan relatif mudah penerimaannya dari pihak Bruneinya yang

memang membutuhkan sekali PMI. Data ini diambil dari kerja etnografi selama tinggal di Brunei. Percakapan yang dilakukan secara intens dalam setiap kegiatan masyarakat Indonesia dan percakapan keseharian di Brunei. Kegiatan tersebut memberikan data melimpah tentang kondisi sesungguhnya.

Berdasarkan data KBRI Bandar Seri Begawan 2018, PMI yang terdaftar di Brunei Darussalam sebanyak 28.830 orang. PMI yang bekerja pada perusahaan atau *syarikat* seperti di warung, *took*, dan profesional) berjumlah 14.165 orang, yang bekerja kepada keluarga/pribadi seperti di sektor domestik sebesar 7.661 orang, yang bekerja di pemerintahan sejumlah 95 orang. Di luar itu, PMI masih banyak tidak terdaftar di KBRI sebab hanya PMI yang melapor saja karena kesadaran untuk melapor atau urusan usai visanya yang terdata di pemerintah Indonesia. Dengan jumlah tersebut dengan dibandingkan dengan negara lainnya, pihak KBRI menyimpulkan Indonesia merupakan pengirim tenaga kerja terbanyak di Brunei Darussalam, diikuti oleh para pekerja negara lain seperti Filipina, Bangladesh, Malaysia, India, Pakistan dan negara-negara lain.¹

Namun demikian, banyak aspek kemampuan PMI yang masih kalah dengan negara lain seperti kepercayaan diri, kemampuan Bahasa Inggris, kemampuan dalam berdebat dan membela diri jika ada salah paham, dan masih banyak hal lainnya. Dalam hal kemampuan berbahasa Inggris, PMI masih berada di bawah rata-rata Malaysia dan Filipina. Kemampuan berbahasa Inggris penting dimiliki karena meskipun Bahasa Melayu merupakan bahasa resmi Brunei. Derajat Bahasa Inggris di Brunei lebih tinggi dari semua Bahasa yang ada sehingga hal itu menampilkan status sosial dan ekonomi

yang cukup menentukan. Dalam dunia kerja, Bahasa Inggris adalah komunikasi dominan dibandingkan Bahasa Melayu karena interaksinya dengan beragam negara-negara di dunia. Banyak pekerja Indonesia menempati posisi buruh *low-skilled* dengan gaji sangat rendah (kira-kira 2,5 jutaan sampai 3, 5 jutaan).

Berdasarkan percakapan penulis dengan PMI selama tinggal selama 2,5 tahun di Brunei, PMI menempati posisi pekerjaan domestik dibandingkan pekerja Filipina yang bisa berbahasa Inggris. Para pekerja Filipina banyak ditemukan bekerja di sektor pelayanan jasa seperti bekerja di kafe, baby sister professional, supermarket, dan toko elektronik memang memakai Bahasa Inggris dipecahkan dengan diadakannya pelatihan bahasa Inggris untuk PMI di Brunei Darussalam.

Beberapa riset tentang migrasi Internasional mengungkapkan banyak problem. Di negara Asia Tenggara atau ASEAN, migrasi internasional atau kawasan dihadapkan tantangan seperti para pekerja ilegal (*irregular workers*) yang sulit dikendalikan dan diatur. Basir (2019) mengungkapkan bahwa ekonomi di negara-negara ASEAN tujuh besar dunia dan 2050 diprediksikan empat besar dunia. Dalam konteks ini, migrasi sangat membantu hal itu. Dalam kondisi inilah, pekerja ilegal sebagai pekerja tidak berdokumen harus ditata dan dikontrol dengan baik antar negara-negara ASEAN. Sayangnya, tidak semua negara ASEAN mempunyai kepentingan nasional yang sama. Selain itu, dalam lingkup bilateral, mereka pun masih sulit bekerja sama atas isu yang sensitive ini. Rekomendasi para sarjana Hubungan Internasional dan hukum internasional sudah begitu banyak, tetapi terhenti di para pemangku kebijakan. Demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara, maka rekomendasi Basir (2019: 174-175),

¹ Komposisi tenaga kerja asing di Brunei Darussalam cukup tinggi yaitu sekitar 28% dari seluruh populasi Brunei sebesar 453.600 (2020). Pemerintah Brunei berupaya mengurangi ketergantungan terhadap tenaga

kerja asing dan terkait itu, memberikan keutamaan kepada warga lokal untuk mengisi lowongan kerja yang ada sebelum dapat diisi tenaga kerja asing.

walaupun isu migrasi sangat sensitif antar negara ASEAN, sebaiknya dibuatkan regulasi bersama. Jika regulasi tidak dibuat bersama, maka masalah pekerja migran dengan mobilitas yang terus meningkat akan menimbulkan banyak masalah yang membuat kerugian ekonomi juga.

Riset lain, Kaur (2015) sudah sejak lama juga mengatakan hal yang sama dengan Basir (2019) hanya saja lebih fokus ke kasus Malaysia. Riset Kaur ini banyak membahas tentang masalah pekerja migran yang tidak terdokumentasikan (*irregular workers*) di Malaysia. Dalam konteks tertentu, di dalam artikel, Kaur menyebutkan perspektif neo-liberal yang berargumen bahwa negara-negara kaya membutuhkan negara-negara miskin atau rakyat yang miskin untuk menjadi pekerja di negara-negara kaya itu karena murah bayarannya. Konteks Malaysia banyak didatangi orang-orang miskin dari Indonesia, Filipina dan Thailand yang tak terdokumentasikan untuk dibayar murah, bahkan dengan tanpa dokumen, mereka mudah dieksploitasi. Namun seperti riset Juliawan (2018), pekerja yang tak terdokumentasi tidak pula menguntungkan Malaysia karena mereka justru membuat banyak masalah di negeri tersebut sehingga harus dideportasi ratusan sampai ribuan orang (Rangga, 30 April 2024; Soekoetjo, 7 Agustus, 2015; VOA Indonesia, 13 Juli, 2021).

Banyak pula yang menggunakan argumen ekonomi yang dikaitkan dengan pengangguran dan populasi. Migrasi internasional akibat dari faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi yang mempunyai efek pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran yang ada di daerah pedesaan (Suyanto, 2018; Aisyah & Rahman, 2022). Para buruh migran adalah 'pahlawan devisa' dalam logika pemerintah Indonesia. Semua pemikiran itu dominan menggunakan logika ekonomi (Arrehag, Sjöberg & Sjöblom 2015; Bredl 2011; Dustmann & Mestres 2010; Mamun & Nath 2010; Quisumbing & McNiven 2010)

. Teori klasik migrasi internasional bersumber dari teori ekonomi *push-pull factor*. Teori ekonomi ini memberikan argumen bahwa pedesaan tidaklah menarik berisi orang yang menganggur, miskin, kurang berpendidikan. Mereka semua sebisa mungkin mencari pekerjaan apapun di luar negeri, tepatnya bermigrasi internasional (Sulistiyono & Wahyuni 2012; Primawati, 2011; Irawaty & Wahyuni, 2011; Subianto, 2006; Putra, Chadijah, & Warsito, 2017). Logika dan praktik inilah yang membuat Indonesia mengirim PMI yang kurang berpendidikan dan bermasalah sebab sejak keberangkatan pun mereka sudah bermasalah di pedesaan (kemiskinan, pengangguran, dan sejenisnya).

Riset ini selaras dengan riset Sukamdi (2007) yang berargumen bahwa fenomena migrasi internasional tidak hanya faktor ekonomi yang dilandaskan teori ekonomi *push-pull factor*. Banyak riset-riset Sukamdi yang berlatar belakang ahli kependudukan dan kebijakan di Fakultas Geografi. Argumen Sukamdi sangat kontekstual dan antropologis sebab migrasi internasional dipahaminya sebagai proses sosial, kebudayaan, dan bisa jadi politis bukan suatu produk/hasil yang ditentukan oleh kalkulasi untung-rugi saja. Cara pandang negara (pemerintah) yang menggunakan kaca mata kuda pertumbuhan ekonomi membuat kebijakan atas rakyat yang menjadi imigran bersifat instrumental, yakni menggunakan pekerja migran dalam hal ini PMI sebagai objek remitan yang dieksploitasi. Dengan kata lain, PMI adalah 'sapi perahan' pemerintah Indonesia sejak era ideologi neo-liberal berkembang di saat krisis minyak. Teori ekonomi *push-pull factor* adalah persepsi dan perspektif sekaligus alat bagi pemerintah dalam memanfaatkan rakyatnya untuk meningkatkan pertumbuhan devisa negara.

Kritik Sukamdi (2007:126) terhadap negara adalah melihat PMI sebagai suatu ekspor komoditas ekonomi yang menghasilkan uang (remitan) demi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sukamdi

berharap, sisi pemerintah melihat PMI sebagai subjek bukan objek, yakni makhluk sosial dan kebudayaan serta psikologis yang kompleks.

Namun penelitian Sukamdi (2007) bersifat umum yakni banyak mengutip berbagai macam argumen para ahli tanpa konteks untuk mengkritik kebijakan yang tidak manusiawi terhadap PMI. Mereka diperlakukan sebagai alat produksi dalam kapitalisme global. Dalam konteks ini, Sukamdi memaparkan perempuan sebagai pekerja domestic yang dieksploitasi tanpa membahas konteks kasus-kasus tertentu. Namun Sukamdi lebih banyak memaparkan kutipan argumen riset-riset yang telah ada. Contoh yang diambil sangat acak di berbagai negara seperti Malaysia dan Singapura yang gaji PMI dipotong untuk penyalur. Sifat risetnya yang umum mengasumsikan bahwa perlakuan negara Indonesia terhadap PMI memang menggunakan perspektif liberal yang mengobjekkan PMI sebagai komoditas ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi di negara manapun juga.

Jika fokus pada kajian Hubungan Internasional, maka peneliti observasi penelitian 5 tahun ke belakang dari 28 jurnal Hubungan Internasional yang tercatat dalam AIHII (Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia). Faktanya ternyata tulisan tentang migrasi ada hanya di bawah 10 artikel. Jika diobservasi sepanjang 28 jurnal terbit, maka isu migrasi sebagai topik utamanya masih di bawah 20 artikel itupun terdiri dari topik Indonesia dan negara lainnya. Isu yang dibahas pun fokus pada PMI yang sudah pulang, PMI perempuan, PMI di Malaysia, dan pembahasan isu *non-traditional security* seperti perdagangan manusia.

Dalam hal ini, riset ini berbeda dari seluruh riset yang telah dipaparkan di atas memang belum ada yang membedah secara mendalam kasus di Brunei. Riset ini tidak melihat dari sisi pemerintah, tetapi dari sisi PMI yang diwawancara secara informal

keseharian secara etnografis selama 2 tahun peneliti tinggal di Brunei.

Kerangka Teori

Riset ini menggunakan kerangka besar pendekatan fenomenologi. Fenomenologi mempunyai akar kata dari bahasa Latin, *phaenesthai* yang berarti “menampakkan dirinya sendiri”. Yang ditampakkan adalah kesadaran, persepsi, perasaan, emosi, dan pengalaman indrawi secara subjektif yang diteliti secara intensional (Mulyana, 2018:55).

Riset ini menggunakan pendekatan fenomenologi karena penulis berusaha menangkap makna kehidupan secara utuh bagi para pekerja migran Indonesia (PMI) yang ada di Brunei Darussalam. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak mereduksi ke dalam kerangka logika atau rasionalitas yang sifatnya mekanik. Fenomenologi yang menurut kami tepat adalah fenomenologi yang dikembangkan Schutz karena objek risetnya aspek sosial. Schutz memberikan petunjuk untuk mencari makna dalam tindakan, ucapan, dan interaksi yang merupakan prasyarat bagi eksistensi sosial PMI.

Dalam kerangka Schutz, PMI menerima dunia keseharian secara apa adanya (*given*) melalui interaksi saling memahami dan berbagi perspektif dalam konteks ruang waktu yang unik. Dalam proses penerimaan realitas keseharian ini, PMI mengakumulasi sejarah hidupnya secara berbeda-beda tergantung preferensi masing-masing.

Dalam proses di atas, PMI memiliki pengetahuan secara sadar tidak hanya rasional dan logis, tetapi semua kepercayaan/mitos, fakta-fakta subjektif, keinginan, kemasukakalan, prasangka dan aturan yang kita serap dari realitas sosial. Semua itu bersumber dari pengalaman pribadi dan daya tampung pengetahuan (PMI) yang siap pakai untuk diekspresikan dan dihadirkan serta dimunculkan di dunia keseharian (Mulyana, 2018:98). Jadi setiap individu adalah pribadi yang unik

(Mulyana, 2018:98). Dari pribadi yang unik ini berinteraksi secara inter-subjektif dengan pribadi unik lainnya sehingga terbentuk realitas objektif sosial. Di sisi PMI, interaksi tersebut menciptakan kesadaran dan pengetahuan baru serta menambah makna baru. Motifnya adalah kehadiran terus-menerus dari subjek (sang diri) di masa depan (Kuswarno, 2013: 110-111).

Argumen yang dibangun dalam kerangka ini adalah memperlakukan atau memahami PMI sebagai manusia seutuhnya bukan makhluk ekonomi demi pertumbuhan ekonomi Indonesia. PMI adalah makhluk eksistensial yang sangat reduktif dan tidak adil jika diteorikan atau dikonsepsikan. Teori dan konsep dicurangi politis dan penuh kepentingan seperti teknis, ekonomis, dan pragmatis. Oleh sebab itu, artikel ini menegaskan tidak menggunakan teori dan konsep, tetapi penulisan naratif-etnografis dengan menampilkan refleksi fenomenologis penulisan yang intens berinteraksioi dengan PMI selama 2 tahunan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif, yakni data menggunakan non angka dan analisisnya interpretatif (Bryman, 2012: 380-408). Metode ini menggunakan data naratif seperti dalam bentuk pernyataan, wawancara, cerita pengalaman etnografi peneliti. Kalaupun berupa data angka, maka tafsirnya pun dinarasikan sehingga menghasilkan makna. Singkat kata, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat interpretif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode dalam menelaah masalah penelitiannya (Mulyana, 2018:5).

Dalam riset ini, pendekatan fenomenologi adalah penelaah objek penelitian pekerja migran Indonesia (PMI). Hal ini membedakan riset-riset sebelumnya yang meneliti perlindungan pekerja migran yang dilakukan oleh pemerintah atau institusi regional seperti ASEAN atau

LSM. Teknik penelitian riset ini sama dengan penelitian Quinlan (2020), yakni teknik etnografi dalam melihat fenomena migrasi sehingga mempunyai konsekwensi tidak berdasarkan pada teknik deduktif, tetapi induktif dengan mencari makna dibalik cerita-cerita naratif PMI. Riset ini dilakukan pengumuplan datanya sejak awal pandemik di Brunei Darussalam selama 2 tahun sejak 2020-2022 dan 2023 pulang pergi Jakarta-Bandar Seri Begawan. Data diperoleh dari PMI yang berinteraksi intens dengan penulis dan juga KBRI Brunei Darussalam. Para PMI sudah lama tinggal di Brunei sejak sebelum pandemik ada yang sudah bertahun-tahun ada pula yang baru sejak tahun 2020 sehingga di saat pandemic Februari 2020, mereka semua tidak dapat pulang (terjebak), *lock down*. Saat itu tidak ada satu pun pesawat.

Riset ini melibatkan subjektifitas peneliti karena peneliti menjadi bagian dari yang diteliti. Riset ini diukur objektivitasnya dari orisinalitas peneliti sebagai subjek yang terlibat di dalam kehidupan PMI. Otentisitas tulisan ini sangat diunggulkan apalagi sulitnya memperoleh data dari Brunai sebab pemerintahan Brunei sangat tertutup. Pemerintahan Brunei adalah negara Kerajaan Islam Absolut yang tidak ada media yang bebas. Jadi semua berita dan suara yang berbicara tentang Brunei adalah representasi dari kerajaannya. Tulisan ini dikerjakan setelah keluar dari Brunei karena mempertimbangkan berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi kondisi penulis dan tulisannya.

Hasil dan Diskusi

Dalam konteks globalisasi yang bersistem kapitalisme global, negara terus berusaha mengontrol perpindahan manusia (human mobility) antar negara. Namun dunia yang semakin kosmopolit, negara tidak bisa mengontrol sepenuhnya karena masih ada ruang-ruang tertentu yang membuat warga negara tertentu berpindah dengan alasan

berwisata atau berkeunjung ke tempat keluarga, tetapi setelahnya mereka diperkerjakan atau mencari pekerjaan.

Di negara Selatan-Selatan, khususnya Asia Tenggara, antar negara terjadi ketimpangan ekonomi sehingga warga negara suatu negara yang penghasilannya rendah tidak sesuai dengan keringat yang dikeluarkan, maka seseorang tersebut akan mencari kesesuaian di negara lain. Misalnya, beberapa kasus kawan penulis yang bekerja di Brunei dan Malaysia. Kedua teman penulis keluar dari pegawai negeri (ASN) untuk menjadi PMI di Brunei dan Malaysia. Walaupun mereka memiliki resiko dipersulitnya surat lolos butuh dari pihak universitas di Indonesia, adanya surat pemecatan yang merugikan nama baik mereka dan rendahnya gaji yang tidak sebanding dengan kebutuhan normal yang ada.

Hal tersebut terkait dengan konsep *human security*, yakni keamanan seseorang yang tidak diperoleh di Indonesia dalam bekerja secara politik, ekonomi, kesehatan, dan sosial. Konsep tersebut dipakai oleh Safitri dan Wibisono (2023) dalam membaca PMI di Malaysia, Arab Saudi, Hong Kong, Taiwan, dan Fiji. Negara-negara tersebut diambil secara random untuk membuktikan pentingnya *human security* yakni perlindungan PMI di luar negeri. Dapat disimpulkan bahwa pekerja migran di negara-negara Selatan kurang mendapat perlindungan, khususnya untuk pekerja migran rendah ubah dan pekerja tidak terampil (*non-skilled worker*). Jadi bekerja di Indonesia atau di negara-negara Selatan masih belum terwujud *human security*.

Mengapa Brunei?

Brunei adalah sebuah negara Kerajaan Islam Absolut yang dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah. 1 Januari 1984, Brunei memperoleh kemerdekaan dari Inggris sekaligus di waktu yang sama menjadi anggota *commonwealth* Inggris. 7 Januari 1984, Brunei masuk ke dalam keanggotaan

ASEAN dan 22 September 1984, Brunei masuk menjadi anggota PBB. Tahun 2013, Brunei menerapkan sistem syariat Islam ke dalam pemerintahannya sebagai dasar aturan bernegara sama halnya Aceh di Indonesia. Sistem politik Brunei dalam kerangka Melayu Islam Beraja (MIB), yakni budaya Melayu, agama Islam, dan kerangka pemerintahannya adalah kerajaan.

Gambaran di atas dapat memberikan petunjuk bahwa semua kerja sama yang dilakukan Brunei diberikan titahnya dari Sultan Hassanal Bolkiah. Semua bawahan Sultan tidak mempunyai otoritas menentukan kebijakan penting sehingga harus meunggu titah raja.

Dalam rangka ketenagakerjaan, pengupahan tenaga kerja sektor non formal atau sektor domestik sangat problematis, yakni tidak tentu dan belum ada standarisasi di dalam negerinya dan belum ada MoU antara Brunei dengan negara lain sedangkan upah di sektor formal seperti kerja di pertambangan, dosen, perusahaan, dan sejenisnya sudah sangat jelas. Bahkan pekerjaan populer di Brunei adalah pegawai negeri, tetapi hanya diperuntukkan untuk bangsa Melayu sama persis dengan Malaysia sedangkan di sektor ekonomi dikuasai oleh warga bangsa Cina. Para Pekerja Bangladesh dan Indonesia banyak di sektor informal, domestik, dan *unskilled workers*, seperti pembantu rumah tangga, tukang kebun, tukang jaga toko, aspal jalanan, tukang sampah, dan sejenisnya. Lain halnya para pekerja Filipina yang mendominasi di sektor keterampilan seperti supervisor atau manager di perusahaan, sales professional, dan pekerja café, perawat di rumah sakit, dan sejenisnya.

Sejak Covid-19, Brunei mengalami kesulitan, keterbatasan pekerja domestik (*domestic workers*) dari Indonesia karena adanya penghentian sementara. Orang-orang Brunei banyak yang mengeluh sebab mereka sangat tergantung pada PMI. Nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Brunei dalam bidang perlindungan dan

pengupahan pekerja domestik masih alot sedangkan Malaysia sudah terwujud MoU (Kemenlu, 2022). Dengan demikian, sampai tahun ini (2024), Indonesia tidak mengirim tenaga kerjanya kecuali yang benar-benar professional dan terlatih seperti dosen dan pekerja tambang yang laung dipekerjakan melalui perusahaan atau universitas. Bagi para pekerja di sektor domestik yang tetap sampai di Brunei, maka sudah jelas mereka illegal dalam dokumen dan pemberangkatannya dari Indonesia, kecuali yang sudah dipekerjakan sejak lama dan terus diperpanjang kontraknya. Walaupun bolak balik Brunei-Indonesia, mereka tetap dalam status bekerja.

Fenomenologi Alasan PMI di Brunei

Seperti disinggung di atas, fenomenologi adalah penelitian yang menggali secara intensional antara peneliti dan yang diteliti fenomena sosial secara menyeluruh tidak pada aspek rasional, tetapi pada kesadaran, persepsi, perasaan, emosi, dan pengalaman indrawi secara subjektif. Pertemuan penulis dengan yang diteliti agar objek penelitian muncul dengan sendirinya melalui pertemuan yang intens dan berkali-kali. Misalnya, penulis sering bertemu bersama PMI baik di bandara maupun di pesawat saat pulang-pergi Brunei-Indonesia (setiap bulan sekali, selama 2022). Penulis banyak melakukan perbincangan dengan PMI selama itu. Selain itu, penulis juga sering bersama-sama dengan PMI dalam kegiatan seperti pengajian, interaksi sosial di malam hari (*tongkrongan*), olah raga bersama, dan mengikuti perayaan besar seperti hari raya idul fitri dan Idul Adha. Penulis juga melakukan kunjungan ke perkebunan milik warga Brunei yang memperkerjakan PMI. Selain melihat lingkungan kerja mereka, penulis juga melakukan perbincangan mendalam dengan PMI terkait kondisi kerja, upah, perlakuan majikan, dan jenis pekerjaannya.

Temuan dari PMI yang bekerja di Brunei cukup beragam: ada PMI yang

senang tinggal di Brunei, ada PMI yang dengan terpaksa tinggal di Brunei, dan ada PMI yang menargetkan lamanya bekerja di Brunei sampai cukup hasil yang diperoleh lalu kembali ke Indonesia. Dari tiga hal itu, penulis menemukan kompleksitas kemanusiaan tanpa direduksi hanya ke dalam kerangka rasionalitas. Selain aspek Brunei mempunyai daya tarik tersendiri dibandingkan negara lain, mereka juga tidak serta merta hanya upah yang ditarget. Upah memang menjadi salah satu target mereka, tetapi upah bukan satu-satunya daya tarik mereka bekerja ke Brunei.

Teori migrasi yang bersumber dari teoritisasi ekonomi yang telah dipaparkan di atas tidak seutuhnya benar sebab dalam bermigrasi bekerja di luar negeri begitu banyak yang diperoleh, khususnya konteks kehidupan secara menyeluruh dalam suatu ekosistem tempat hidup yang dialaminya. Hal itulah yang menentukan nyaman atau tidaknya hidup di Brunei.

Pertama, bagi yang suka tinggal di Brunei, mereka mempunyai majikan yang baik, waktu yang normal dalam menjalani kehidupan dan memperoleh lingkungan yang nyaman. Misalnya, pekerja sesuai dengan jam kerja 8-5 jam dengan keleluasaan kerjaan yang mereka lakukan, tanpa harus diawasi secara ketat sebab mereka tahu apa yang mereka kerjakan. Majikan percaya dengan pekerjaan mereka. Bagi majikan yang terpenting mereka selesai dengan tanpa komplain. Siang hari mereka dapat pulang untuk makan siang dengan keluarga atau memilih tetap di tempur kerja dengan membawa bekal makanan. Sore hari mereka dapat pulang tepat waktu dan kembali berkumpul dengan keluarga (ada pula yang upahnya belum bisa memenuhi membawa keluarga, maka bisa bertemu dengan teman-temannya untuk melepas lelah). Pengeluaran mereka dapat dikendalikan karena di Brunei banyak pilihan gaya hidup dari yang paling mahal sampai ke yang paling murah. Di hari libur, mereka ikut libur kemana saja mereka

inginkan, termasuk pergi ke Malaysia yang memang jaraknya dekat dengan Brunei.

Mereka rata-rata bekerja sebagai montir mobil, pekerja di perusahaan (sales, Gudang, pemasok barang), mengatur café atau restoran. Di malam hari, montir dapat pekerjaan tambahan di rumah karena banyak langganan yang langsung ke rumahnya. Pekerja lain mempunyai komunitas untuk berinteraksi dan jaringan pertemanan yang saling bantu satu dengan yang lainnya. Di Brunei ada keguyuban yang belum tentu ditemui di negara lain atau bahkan di Indonesia sendiri. Rasa persaudaraan yang kuat membuat nyaman hidup di Brunei. Para pekerja ini mempunyai waktu luang banyak setelah bekerja siang hari sehingga ada waktu di malam hari untuk melakukan aktivitas sosial yang produktif menciptakan ekosistem kehidupan kekeluargaan. Aksi-aksi komunikasi terjalin sehingga terwujud ikatan batin antar PMI. Mereka saling tolong menolong satu dengan yang lain. Singkat kata, PMI jenis ini lebih nyaman hidup di Brunei dan akan tinggal sampai lama sampai mereka tidak lagi produktif di umurnya. Fenomena ini adalah praktik-praktik diskursif Habermas yang emansipatoris dalam kritik ideologi dan rasio-instrumental yang dalam konteks modernitas telah tergerus oleh sistem kapitalisme global (Rasmussen, 1982; Spracklen 2009; Amargo, 2020)

Penulis berbincang-bincang dengan PMI yang juga ikut kuliah di Universitas Terbuka di Brunei. Mereka mempunyai semangat belajar. Semangat ini didukung oleh majikan mereka. Mereka mempunyai kepercayaan diri yang cukup, komunikasi yang lumayan lancar dengan majikan atau perusahaan tempat mereka bekerja. Umumnya mereka memperoleh majikan yang sangat membantu kehidupan mereka sehingga mereka lama bekerja di Brunei (lebih dari 3 tahunan). Mereka adalah PMI yang berdokumen dengan kemampuan yang potensial berguna dan mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja.

Mereka bahkan menyempatkan diri setiap hari libur untuk belajar Bahasa Inggris di KBRI dan mempunyai komunitas yang mempunyai waktu berlibur bersama-sama. Jadi dengan beban kerja yang ada di Brunei, mereka masih ada waktu kuliah dan belajar Bahasa Inggris untuk meningkatkan kompetensi berbahasa mereka.

Mengapa mereka begitu bersemangat untuk belajar? Dalam hal ini, sesama PMI saling berpendapat. Menurut beberapa PMI, orang rantau Indonesia tidak kalah dengan pekerja lainnya bahkan unggul kerja kerasnya dibandingkan Filipina. Disayangkan PMI kita masih kalah berdebat dengan bahasa Inggris. Ketika mereka disalahkan oleh pekerja lainnya, mereka selalu diam atau kalah argument dengan orang misalnya Filipina. Rata-rata yang kuliah dan belajar Bahasa Inggris adalah PMI yang beragam pekerjaannya, tetapi tidak ada yang menjadi pekerja domestik seperti pembantu rumah tangga, tukang kebun, dan sejenisnya. Singkat kata, dengan adanya tingkat Pendidikan yang tinggi, PMI jarang sekali bermasalah.

Kedua, bagi yang tidak suka di Brunei bahkan setelah Covid-19 banyak PMI yang tidak berdokumen berdatangan. Di saat “penghentian sementara”, mereka tetap datang ke Brunei dengan visa non bekerja dengan membawa masalah dari Indonesia. Ada yang sudah stress, ada yang mempunyai masalah dengan keluarganya, dan ada pula yang memang sudah stress sejak awal karena rumitnya permasalahan di Indonesia. Hidup di Indonesia tidak mudah sehingga banyak orang Indonesia yang cukup mempunyai kemampuan bisa keluar negeri, mereka keluar negeri (Dadush, 2014). Riset Dustmann (2003) menemukan bahwa para pekerja yang sudah memperoleh upah yang layak di negeri asalnya, mereka memilih berpindah ke asal negerinya. Jadi negeri asal memang harus membantu mempermudah mendapat penghasil yang layak bagi kemanusiaan (hidup normal/standar yang ada)

Oleh sebab itu di tempat penampungan PMI di KBRI Bandar Seri Begawan, PMI pasca Covid-19 cukup banyak kasus yang ditangani dan memang membuat cukup lelah para staf KBRI yang terbatas. Utamanya PMI di tempat penampungan secara mental memang sangat tertekan dan frustrasi sehingga memang perlu bantuan tidak hanya kebutuhan makan dan tempat tinggal saja tetapi kebutuhan psikologi. Mental health PMI ditangani apa adanya oleh staf KBRI sebab memang tidak ada ahlinya dalam hal itu. Riset Mucci, Traversini, Giorgi, Tommasi, De Sio, dan Arcangeli (2019) membuktikan bahwa Kesehatan mental sangat penting bagi para pekerja migran. Hal ini juga dikuatkan oleh risetnya Harjana, Januraga, Indrayathi, Gesesew, dan Ward (2021) yang menemukan kasus depresi dan kegelisahan di PMI khususnya selama pandemic Covid-19.

Ada kasus PMI yang baru datang sehari besoknya sudah mau pulang karena tidak cocok dengan ekspektasi awal saat di Indonesia. Memang mereka yang berdatangan itu tidak berdokumen. Dikatakan dari posisi Indonesia, mereka illegal, tetapi di Brunei yang sedang membutuh para PMI tersebut legal dan diterima saja. PMI yang illegal memang cukup banyak di Brunei. Menurut penuturan KBRI (2022) yang biasanya diinfokan di hari-hari besar seperti Idul Fitri diperkirakan PMI illegal lebih dari setengahnya yang legal. Mereka akan diketahui ketika mereka harus melapor perpanjangan passport. Pihak KBRI dihari-hari besar tersebut biasanya menghimbau kepada seluruh warga Indonesia yang datang di acara Idul Fitri tersebut agar para PMI melapor ke KBRI untuk mengadministrasikan dokumen mereka. Jangan sampai, mereka datang pada saat bermasalah sehingga urusannya menjadi rumit dengan konsekwensi PMI sendiri yang dirugikan. PMI yang benar-benar tidak peduli terhadap diri sendiri dan tidak peduli terhadap harga diri bangsanya adalah

mereka yang tidak melapor dan membawa masalah. Konteks tersebut bukan dari interpretasi penulis, tetapi pemahaman ini disayangkan oleh PMI yang tertib administrasi. Tindakan PMI tak berdokumen justru merugikan PMI yang berdokumen karena terkena dampak citra negatifnya. Secara umum, citra bangsa Indonesia juga tercoreng.

Penulis kurang perhatian dengan pelaporan BP2MI sebab faktanya, PMI di Brunei selalu ada yang datang walaupun kondisinya masih dihentikan sementara pasca Covid-19 dengan jumlah yang besar. Fakta ini dialami oleh penulis yang setiap bulan pulang-pergi Jakarta-Bandar Seri Begawan dan perbincangan penulis dengan staf KBRI. Bagaimana mungkin, PMI banyak berdatangan dari Indonesia di saat pengehentian sementara (moratorium) tanpa ada pengetahuan dari BP2MI? Sudah menjadi rahasia umum diantara para PMI di Brunei, banyak “oknum” istilahnya, bermain dalam proses keberangkatan PMI illegal itu. Hal itu juga ditegaskan oleh pihak Humas BP2MI (2024). Oleh sebab itu hal ini menjadi perhatian khusus bagi semua pihak. Jika berefleksi sejarah, tindakan oknum dalam institusi kenegaraan sudah ada sejak jaman Belanda. Oleh sebab itu, tradisi korupsi lahir sejak adanya korupsi para raja Jawa atas Belanda. Mengapa sejak jaman Belanda? Sebab ketika jaman penjajahan, Belanda sudah memperhitungkan sistem perpajakan dan keuntungan dari perkebunan dan sumber alam lainnya. Misalnya perpajakan dan pekerjaan bagi perkebunan yang dalam politik etis cukup manusiawi atas pekerjanya, tetapi hal itu tetap dikorup oleh para raja sehingga para pekerja bekerja semakin keras dengan penghasilan diambil untuk para raja (dengan gamblang bisa dilihat di film Max Havelaar dalam konteks kerajaan di Banten). Jadi sesungguhnya yang membuat sengsara rakyat Indonesia adalah para elit raja di jaman Belanda dan di jaman sekarang adalah para elit pelaku di dalam institusi kenegaraan Indonesia.

Penulis pernah menemani seorang PMI pergi ke rumah sakit untuk pengecekan kejiwaannya 2021 sebelum ia dipulangkan ke Indonesia. Penulis meminta izin kepada staf KBRI Bandar Seri Begawan untuk ikut mendampingi PMI. Tidak sedikit, PMI di Brunei harus dibawa ke rumah sakit untuk menyembuhkan kejiwaannya agar proses pemulangannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti membuat masalah dalam proses pemulangan. Pengamatan penulis, kondisi mental yang sangat lemah itu pula, para PMI di penampungan biasa kesurupan sehingga staf KBRI harus ekstra kerja bahkan untuk menjadi semacam penangkal makhluk gaib. Sebagai tambahan, terkait kondisi stres dan lemah mental ini, layanan psikologi untuk menangani kondisi mental pun tidak dianggarkan pihak pemerintah sehingga staf KBRI pun harus kerja ekstra menjadi ‘psikolog cabutan’.

Pengamatan penulis atas hal ini membuahkan refleksi bahwa kondisi di Indonesia sangat sulit, pengangguran dimana mana dan kehidupan perkampungan justru lebih sengsara dibandingkan di perkotaan yang tetap bisa bekerja demi bertahan hidup. Hal itu dijustifikasi dengan argumen Meilinda (2017) bahwa bekerja di luar negeri selain mengurangi pengangguran di Indonesia juga menghasilkan remitansi yang membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, dalam konteks riset ini, pilihan warga kampung adalah bekerja ke Brunei. Ada harapan di Brunei lebih baik kehidupannya dibandingkan kesengsaraan di Indonesia.

Namun kemampuan PMI yang dimiliki tidak sesuai ekspektasi para majikan di Brunei sehingga tidak sedikit PMI membuat kesal dan marah para majikan. Hal inilah yang membuat mereka diperlakukan tidak semestinya. PMI yang tak berpendidikan dan memang hanya ingin melarikan diri dari masalah di Indonesia ke Brunei sesungguhnya akan mengalami nasib buruk juga sebab mereka sulit

beradaptasi dalam lingkungan kerja di Brunei. Banyak perabotan seperti mesin cuci, microwave, setrikaan, dan lainnya tidak dipahami oleh PMI dari Indonesia, khususnya kampung. Adanya kendala bahasa yang menciptakan salah paham antara mereka juga menambah kerumitan hubungan mereka dengan majikan. Perbedaan budaya, khususnya perilaku kebiasaan PMI Indonesia yang tak berpendidikan dan keras kepala serta merasa lebih tahu dari majikan membuat kesal para majikan sampai ada yang dipukuli dan tidak sedikit yang lari ke KBRI. Banyak pula agen-agen nakal yang memberi saran kepada PMI illegal jika ada masalah dengan majikan maka lari saja ke KBRI. Hal ini sangat membebani pihak KBRI yang stafnya terbatas dan memang membuat *overload* proses pelayanan terhadap warga Indonesia di Brunei. Oleh sebab itu, sebelum keberangkatan para agen seharusnya ketat menjalankan pelatihan menjadi pekerja domestik (Baharudin, 2007; Yolanda, 2020).

Ketiga, PMI yang mempunyai pilihan untuk kembali di Indonesia. Penulis tidak mengkuantifikasikan berapa jumlahnya, tetapi sasarannya adalah perbincangan penulis dengan mereka. Mereka adalah para pekerja berdokumentasi yang berkontrak dengan perusahaan. Mereka banyak pekerja ke Brunei untuk memperoleh pengalaman sehingga dengan portofolio yang semakin banyak dan berkualitas, maka mereka akan memperoleh pekerjaan yang lebih mumpuni dan menantang lagi. Mereka adalah pekerja terampil yang memang melamar kerjaan profesional dari Indonesia. Ada pula yang memang dikirim perusahaan yang ada di Indonesia ke Brunei untuk beberapa tahun. Penulis temui juga saat mereka mengambil kelas bahasa Inggris yang diadakan oleh penulis di KBRI (Maliki, Afrimadona, Hasyati, & Farrahdiba, 2022). Mereka bercerita bahwa bekerja di Brunei cukup menantang dan menyenangkan. Semua pekerjaannya jelas

sehingga tidak ada tambahan pekerjaan di luar yang sudah ditentukan. Mereka mempunyai waktu jelas dalam pekerjaannya sehingga mempunyai waktu untuk berlibur bersama keluarga atau kawan-kawannya. Mereka juga tidak mengalami diskriminasi ras berbeda dengan pekerja domestik yang tidak mempunyai kemampuan (*skill*).

Dengan keterbatasan ruang dan jumlah kata dalam penulisan ini, penulis berargumen bahwa PMI pergi ke Brunei tidak hanya untuk uang tetapi mencari pengalaman, ekosistem kerja dan kehidupan, perasaan eksistensial PMI. Argumen ini telah dibuktikan dengan data yang ditemukan di lapangan bahwa PMI yang ditemui secara langsung oleh penulis memang banyak cerita tentang kehidupan mereka yang menarik di Brunei. Sayangnya tidak semua PMI menemukan penghidupan nyaman seperti itu. Memang PMI pekerja domestik khususnya yang tidak berdokumen (*illegal*) walaupun terlihat menargetkan upah untuk penghidupan yang lebih layak di Indonesia, tetapi kondisi mereka memprihatinkan. Mereka tidak hanya bertujuan mencari upah yang layak, tetapi mereka memang mengalami kondisi lebih stress dan bermasalah di Indonesia sehingga lebih baik pergi merantau ke Brunei dengan asumsi mereka hidup lebih baik. Namun demikian, mereka tidak cukup pengetahuan dan kepandaian dalam beradaptasi dengan lingkungan dan majikannya sehingga mereka juga bermasalah di Brunei. Singkat kata, PMI di Brunei mempunyai kehidupan yang kompleks dengan kajian kualitatif. Mereka bukan mesin uang bagi keluarga di Indonesia dan bagi negara, tetapi mereka mempunyai banyak target dan kondisi yang membuat mereka harus ke Brunei. Kompleksitas semacam inilah yang hanya bisa dikaji dengan fenomenologi tanpa teori yang cenderung menilai dan deterministic.

Dengan demikian, tulisan ini bersifat naratif tanpa teori dan konsep. Teori dan konsep dicurigai politis sebab

keduanya diproduksi demi kepentingan tertentu. Selain itu, produk pengetahuan berupa teori dan konsep adalah proses panjang ‘manipulasi’ pengetahuan demi kepentingan teknis atau pragmatis atau ekonomis. Jadi keputusan artikel ini tepat untuk menghindari pemakaian teori dan konsep tertentu. Artikel ini justru menarasikan berbagai macam refleksi fenomenologis penulis selama tinggal di Brunei yang tengah berinteraksi dengan ratusan PMI selama 2 tahunan.

Simpulan

Setelah mengalami berbagai macam pengalaman panjang berinteraksi dengan PMI di Brunei, maka ada beberapa catatan yang perlu dipertimbangkan: *Pertama*, menghadapi PMI tidak bisa menggunakan pendekatan ekonomis saja, seolah-olah mereka adalah alat produksi. Mereka adalah manusia eksistensial yang perlu diajak berbicara tentang problematika kehidupannya. *Kedua*, pemerintah perlu menyiapkan dana untuk penempatan psikolog untuk meringankan beban staf KBRI yang tidak mempunyai team ahli menangani banyak kasus PMI stres, frustrasi, dan gangguan jiwa sampai pada titik terendah –mudah dirasuki makhluk gaib di tempat penampungan. *Ketiga*, keputusan Mantan Duta Besar Brunei saat itu, Bapak Sujatmiko sangatlah tepat untuk menghentikan sementara pengiriman PMI, khususnya untuk pekerja domestik. Ruang inilah yang membuat banyak masalah multi-kompleks baik di Brunei maupun di Indonesia setelah kepulangannya. Ketiga hal itulah yang perlu dieksekusi para pengambil kebijakan.

Daftar Pustaka

- ADIMA Soekoetjo, A (7 Agustus, 2016), Malaysia Bersiap-siap Deportasi 3 Ribuan Buruh Migran Indonesia, *KBR*, <https://kbr.id/berita/nasional/malaysia-bersiap-siap-deportasi-3-ribuan-buruh-migran-indonesia>.
- Aini, N. (2010). Social Habitus of Domestic Workers' Family: The Influence of Remittance to Domestic Workers' Family. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(3), 291-205.
- Aisyah, S., & Rahman, A. (2022). Karakteristik sosial ekonomi dan demografi yang mempengaruhi remitan pekerja migran. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 19(1), 1-14.
- Arrehag, L., Sjöberg, Ö., & Sjöblom, M. (2015). Cross-border migration and remittances in a post-communist society: return flows of money and goods in the Korçë district, Albania. *South-Eastern Europe Journal of Economics*, 3(1), pp. 9-40.
- Babic, M., Fichtner, J., & Heemskerk, E. M. (2017). States versus Corporations: Rethinking the Power of Business in International Politics. *The International Spectator*, 52(4), 20–43. <https://doi.org/10.1080/03932729.2017.1389151>.
- Baharudin, E. (2007). *Perlindungan hukum terhadap tki di luar negeri pra pemberangkatan, penempatan, dan purna penempatan* (Vol. 4). Esa Unggul University.
- Basir, S. M. (2020). Irregular migrations in Southeast Asia: Challenges for protection and migration policy. *Indonesian Journal of International Law*, 17(2), 145-180, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol17.2.782>.
- Best, J. (2020). The quiet failures of early neoliberalism: From rational expectations to Keynesianism in reverse. *Review of International Studies*, 46(5), 594–612. doi:10.1017/S0260210520000169.
- Bredl, S. (2011). Migration, remittances and educational outcomes: The case of Haiti. *International Journal of Educational Development*, 31(2), 162-168.
- Camargo, S. (2020). Capitalism and Utopia in the social theory of André Gorz. *New Proposals: Journal of Marxism and Interdisciplinary Inquiry*, 11(1), 59-65.
- Dadush, U. (2014). The effect of low-skilled labor migration on the host economy. *World Bank KNOMAD Working Paper Series*, 1.
- Dustmann, C. (2003). Return migration, wage differentials, and the optimal migration duration. *European Economic Review*, 47(2), 353-369.
- DW (28 Desember, 2009), *Thailand Pulangkan Pengungsi Hmong ke Laos*, <https://www.dw.com/id/thailand-pulangkan-pengungsi-hmong-ke-laos/a-5065261>
- Harjana, N. P. A., Januraga, P. P., Indrayathi, P. A., Gesesew, H. A., & Ward, P. R. (2021). Prevalence of depression, anxiety, and stress among repatriated Indonesian migrant workers during the COVID-19 pandemic. *Frontiers in Public Health*, 9, 630295.
- Humas BP2MI, (24 Januari 2024), Kepala BP2MI Tegaskan Tim Pengawas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Agar Tidak Koruptif, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/kepala-bp2mi-tegaskan-tim-pengawas-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-agar-tidak-koruptif>
- Irawaty, T., & Wahyuni, E. S. (2011). Migrasi Internasional Perempuan Desa dan Pemanfaatan Remitan di Desa Pusakajaya, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, 5(3), 297-310.

- Juliawan, B. H. (2018). Seeing Migration like a State: The case of irregular Indonesian migrant workers deported from Malaysia. *Anti-Trafficking Review*, (11).
- Kaur, A. (2015). Labour migration, irregular movements and regional policies. Migration and integration in Europe, Southeast Asia, and Australia: *A comparative perspective*, 75-98.
- Kemlu (1 April 2022), Indonesia-Malaysia Sepakati MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia, *Kemlu*, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3475/berita/indonesia-malaysia-sepakati-mou-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia>
- Khanna, P. (20 April, 2016), The New World Order Is Ruled By Global Corporations And Megacities—Not Countries, *FastCompany*, <https://www.fastcompany.com/3059005/the-new-world-order-is-ruled-by-global-corporations-and-megacities-not-countries>.
- Koran Tempo (15 Juli, 2023), Pemulangan Pekerja Migran Lewat Pemulangan, *Koran Tempo*, <https://koran.tempo.co/read/nasional/483223/demi-memulangkan-pekerja-migran>.
- Kuswarno, E. (2013). Fenomenologi. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Maliki, M., Afrimadona, A., Hasyati, S. A., & Farrahdiba, F. (2022). Pelatihan Bahasa Inggris Pekerja Migran Indonesia di Brunei Darussalam. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(1), 39-48.
- Mamun, K. A., & Nath, H. K. (2010). Workers' migration and remittances in Bangladesh. *Journal of Business Strategies*, 27 (1), pp. 29.
- Meilinda, R. (2017). Latar Belakang Pencabutan Moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia Tahun 2011. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 6(3), 107-118.
- Migration Data portal (31 Mei, 2023), *Migration data in South-eastern Asia*<https://www.migrationdataportal.org/regional-data-overview/south-eastern-asia>.
- Mike Rubi (10 Februari 2019), *Max Havelaar (1976)*, https://www.youtube.com/watch?v=d45tVj5A_iQ
- Mucci, N., Traversini, V., Giorgi, G., Tommasi, E., De Sio, S., & Arcangeli, G. (2019). Migrant workers and psychological health: A systematic review. *Sustainability*, 12(1), 120.
- Mulyana, D. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Primawati, A. (2011). Remitan sebagai dampak migrasi pekerja ke Malaysia. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 16(2), 209-222.
- Putra, M. A. J., Chadijah, R., & Warsito, H. (2017). Remitan dan pemanfaatannya terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga: Studi kasus Desa Seriguna Kecamatan Teluk Gelam Oki. *Demography Journal of Sriwijaya (DeJoS)*, 1(2), 20-33.
- QUINLAN, M. (2020). *Migration and Religion: Muslim Migrant Experience on Sumba and West Timor* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Rangga, O. (30 April 2024), Ribuan WNI Dideportasi dari Malaysia melalui PLBN Entikong, *RRI*, <https://www.rri.co.id/nasional/664000/ribuan-wni-dideportasi-dari-malaysia-melalui-plbn-entikong>.
- Rasmussen, D. M. (1982). communicative action and philosophy: reflections on habermas theorie des kommunikativen handelns. *Philosophy & Social Criticism*, 9(1), 1-28.
- Rother, S. (2018). Labour migration in Southeast Asia: in search of regional governance. In A. Ba & M. Beeson (Eds.), *Contemporary Southeast Asia:*

- The politics of change, contestation, and adaptation*, 181-197.
- Safitri, D., & Wibisono, A. A. (2023). Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan dan Perlindungannya. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(2), 741-769
- Safitri, D., & Wibisono, A. A. (2023). Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan dan Perlindungannya. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(2), 741-769.
- Sari, B. R., Maunati, Y., & Wiratri, A. (2018). *Borders and Beyond: Transnational Migration and Diaspora in Northern Thailand Border Areas with Myanmar and Laos*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Spracklen, K., & Spracklen, K. (2009). Habermas and Communicative and Instrumental Rationality. The Meaning and Purpose of Leisure: Habermas and Leisure at the End of Modernity, 31-51.
- Subianto, A. (2006). *Pengaruh pemanfaatan remitan buruh migran terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten Cilacap (Studi Kasus di Kecamatan Adipala, Kecamatan Binangun dan Kecamatan Nusawungu)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- Sukamdi, S. (2007). Memahami Migrasi Pekerja Indonesia Ke Luar Negeri. *Populasi*, 18(2), 115-128.
- Sulistiyo, P. A., & Wahyuni, E. S. (2012). Dampak remitan ekonomi terhadap posisi sosial buruh migran perempuan dalam rumah tangga. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(3).
- Šumonja, M. (2021). Neoliberalism is not dead – On political implications of Covid-19. *Capital & Class*, 45(2), 215-227. doi:10.1177/0309816820982381.
- Suyanto, S. (2018). Pemanfaatan Remitan Ekonomi dan Ketergantungan Migran Kembali Bekerja di Luar Negeri. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 2(1), 30-37.
- VOA Indonesia (13 Juli, 2021), Malaysia Akan Deportasi Ribuan Migran Indonesia Tak Berdokumen, *VOA Indonesia*, <https://www.voaindonesia.com/a/malaysia-akan-deportasi-ribuan-migran-indonesia-tak-berdokumen/5927020.html>.
- Yolanda, N. (2020). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja indonesia. *Solusi*, 18(2), 198-217.